



BUPATI LAMONGAN

**PENGANTAR NOTA KEUANGAN
ATAS PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2009
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN LAMONGAN**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lamongan

Yth. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lamongan

Yth. Para Anggota Muspida Kabupaten Lamongan

YTH. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah
Daerah, beserta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan, serta hadirin sekalian yang
berbahagia,

Hadirin dan Sidang Dewan Yang Berbahagia,

Pada kesempatan ini terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, karena hanya dengan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat wal'afiat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang kita emban dan mulia ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam yang telah memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada umat seluruh alam untuk kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Mengawali sambutan ini perkenankanlah saya menyampaikan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Yang Terhormat, yang telah memberikan waktunya untuk membahas bersama-sama Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009. Sudah barang tentu pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2009 ini merupakan rangkaian dari pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun 2009 yang telah disepakati bersama dan dituangkan

dalam Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Dewan Yang Terhormat.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sesuai dengan siklus tahunan keuangan daerah, Perubahan APBD merupakan mekanisme yang penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai upaya mengakselerasikan pembangunan daerah dan kebijakan-kebijakan yang berkembang, baik kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah, serta perkembangan kemampuan fiskal daerah pada tahun anggaran berjalan. Faktor-faktor tersebut yang tentunya perlu ditelaah secara seksama untuk dilaksanakan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2009.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah menggarisbawahi bahwa Perubahan APBD harus memperhatikan beberapa kriteria, diantaranya :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
4. Keadaan darurat
5. Keadaan luar biasa

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009, dalam perjalanannya mengalami dinamika perubahan yang cukup kuat, dari sisi fiskal pendapatan dan belanja daerah perlu penyesuaian kembali, selain itu kebijakan pemerintah yang berkembang saat ini juga perlu kita cermati bersama. Krisis ekonomi Global yang ditandai dengan lesunya perekonomian dunia akan sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya yang melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara Amerika dan Eropa, setidaknya permintaan pasar luar negeri terhadap ekspor Indonesia berkurang, menurut datanya turun hingga 50%. Dampak dari penurunan ekspor antara lain kegiatan produksi akan terganggu dan sebagian unit produksi akan dihentikan beroperasi, industri pengolahan akan mengurangi membeli sebagian bahan

baku dari *supplier* termasuk petani dan nelayan, sebagian karyawan pabrik di PHK, sebagian *supplier* akan kehilangan bisnis mereka dan tidak ada kegiatan, pendapatan pekerja akan berkurang atau tidak memiliki pendapatan, banyak pelaku bisnis melakukan penangguhan pembayaran pajak dan sebagian juga sudah tidak punya kemampuan untuk membayar pajak mereka, maka dapat diprediksi bahwa penerimaan negara dari sektor pajak akan berkurang dan akhirnya kemampuan keuangan serta anggaran negara juga akan berkurang, konsekwensinya bagi pemerintah daerah, pendanaan APBD kita yang kurang lebih 90 % dari Pemerintah Pusat juga ikut terpengaruh. Krisis yang dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian Indonesia, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan stimulus melalui program-program yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi sektor riil, pelaku usaha dan masyarakat secara langsung. Untuk mendukung tingkat pertumbuhan perekonomian pemerintah melakukan kebijakan Stimulus fiskal, diberikan dalam bentuk penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dan Perorangan, Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Masuk. Untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi dampak pemutusan hubungan

kerja (PHK) dilakukan melalui program Stimulus tambahan ekonomi tahun 2009 ini antara lain : pertama, mewujudkan penguatan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah melalui Kredit Usaha Rakyat. Kedua, peningkatan daya saing sektor riil atau industri terpilih. Ketiga, pembangunan infrastruktur padat karya. Program perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan serta perbaikan kesejahteraan masyarakat diberikan dalam bentuk perbaikan akses dan kualitas pendidikan, jaminan kesehatan masyarakat, program keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam upaya mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi dampak PHK melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Disamping tekanan faktor eksternal diatas, beberapa kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perubahan APBD Kabupaten Lamongan diantaranya, *Pertama*, masuknya dana-dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan antara lain Dana Tambahan Penyesuaian Tunjangan Fungsional Kependidikan, Dana Alokasi Cukai dan Dana Penyesuaian

Percepatan Pembangunan Daerah serta Bantuan dari Pemerintah Propinsi yang sudah diarahkan antara lain untuk Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana Jalan, Pembangunan Jembatan, dan lain-lain. *Kedua*, Penggunaan Dana Cadangan yang akan digunakan pada perubahan APBD tahun 2009, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pencabutan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 7 tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan. *Ketiga*, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2008, ternyata lebih rendah dari yang ditargetkan pada tahun 2009 sehingga perlu dikoreksi. *Keempat*, Terjadinya pergeseran-pergeseran anggaran yang diusulkan oleh SKPD dan perlu dirumuskan didalam Perubahan APBD.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Saya menyadari bahwa penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 menghadapi kapasitas fiskal yang kurang menggembirakan, disisi lain kita dihadapkan sejumlah kebijakan yang harus dilaksanakan di tahun 2009 ini. Untuk itu

sekarang perkenankanlah saya menyampaikan penjelasan atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH

Didalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 telah memuat jumlah target Pendapatan Daerah yang ditetapkan sebesar *856 milyar 326 juta 113 ribu 982 rupiah* yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 66.155.612.200,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 748.057.196.717,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 42.113.305.065,00

Setelah dilakukan evaluasi, dan penelaahan maka Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD 2009 ditargetkan sebesar *968 milyar 705 juta 872 ribu 062 rupiah* yang berarti mengalami kenaikan sebesar *112 milyar 379 juta 758 ribu 080 rupiah* atau naik sebesar 13,12 persen, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 111.242.158.395,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 735.106.591.717,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 122.357.121.950,00

Kemudian dari masing-masing komponen tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar *45 milyar 86 juta 546 ribu 195 rupiah*. Kenaikan pendapatan tersebut sebagian besar adalah sebagai berikut :

Pajak Penerangan Jalan ditargetkan mengalami kenaikan sebesar *949 juta 886 ribu rupiah*. Kenaikan ini disesuaikan pemakaian daya konsumsi listrik masyarakat dan pemerintah di kabupaten Lamongan yang diperkirakan mengalami kenaikan.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditargetkan mengalami kenaikan sebesar *17 juta rupiah*. Kenaikan ini diupayakan melalui intensifikasi pemungutan melalui pengawasan yang ketat dan menjaring obyek baru sesuai dengan potensi yang ada.

Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Perubahan ini ditargetkan mengalami kenaikan sebesar *1 milyar 248 juta 113 ribu rupiah*. Kenaikan ini diupayakan melalui target

penerimaan dari RSD Dr. Soegiri sebesar *1 milyar 45 juta 106 ribu rupiah* dan target dari Dinas Kesehatan sebesar *203 juta 7 ribu rupiah*.

Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan

Sipil dalam Perubahan ini ditargetkan mengalami kenaikan sebesar *400 juta 965 ribu rupiah*. Kenaikan ini diupayakan melalui Bea Cetak Kartu Keluarga naik *102 juta rupiah* dan Bea Cetak Akte Capil naik *298 juta 965 ribu rupiah*.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam

Perubahan ini ditargetkan mengalami kenaikan sebesar *61 juta 500 ribu rupiah*. Kenaikan ini diupayakan melalui target penerimaan dari pengelolaan Makam Sunan Drajad dan Obyek Wisata Waduk Gondang.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah,⁽¹⁾

ditargetkan mengalami kenaikan sebesar *41 milyar 863 juta 275 ribu rupiah*. Kenaikan berasal dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan yaitu Penjualan Barang Afkiran, dan Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan sebesar *60 juta rupiah*; Kontribusi Dana Bergulir/Revolving ditargetkan mengalami kenaikan sebesar *146 juta 775 ribu rupiah*. Kenaikan berasal dari dana revolving yang dikelola

oleh Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Perikanan dan Kantor Ketahanan Pangan; Kontribusi penjualan Los, Kios, Gudang dan Outlet Pemasaran ditargetkan sebesar *48 milyar rupiah* berasal dari hasil penjualan Pasar Modern dan Lamongan Plaza serta penjualan Los Pasar Ikan sebesar *210 juta rupiah*; Sedangkan terdapat penurunan sebesar *2 milyar 650 juta rupiah* dari Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga Deposito.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dalam perubahan ini mengalami penurunan sebesar *12 milyar 950 juta 605 ribu rupiah*. Penurunan tersebut sebagian besar dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditargetkan mengalami penurunan sebesar *12 milyar 939 juta 994 ribu rupiah*. Penurunan target ini disesuaikan dengan ketetapan pemerintah, namun hal ini akan terus diupayakan realisasi penerimaannya melampaui target melalui pemungutan yang lebih intensif khususnya terhadap PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan PBB sektor Pertambangan.

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam perubahan ini mengalami kenaikan sebesar *80 milyar 243 juta 816 ribu 885 rupiah*. Kenaikan target tersebut diantaranya berasal dari :

Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi mengalami kenaikan sebesar *2 milyar 954 juta 724 ribu 85 rupiah*. Kenaikan ini antara lain bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus mengalami kenaikan sebesar *73 milyar 957 juta 379 ribu 400 rupiah*. Kenaikan target ini antara lain berasal dari Dana Penyesuaian Alokasi Cukai, Dana Penyesuaian Percepatan Pembangunan Daerah dan rencana Pemerintah memberikan Tambahan Dana Penyesuaian Tunjangan Fungsional Kependidikan.

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi,

Penerimaan ini baru dianggarkan pada perubahan APBD Tahun 2009 dan ditargetkan sebesar 3 milyar 294 juta 880 ribu rupiah. Penerimaan ini berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur, meliputi : bantuan TMMD, Pembangunan Jembatan, Penyelenggaraan UAS Standar Nasional, Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana Jalan, Gerduaskin (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan), P2SEM (Program Penanggulangan Sosial Ekonomi Masyarakat), SMPP (Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif), Pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana.

B. BELANJA DAERAH

Penentuan alokasi Belanja Daerah pada proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 betul-betul dilakukan dengan penganggaran yang ketat (*tight budgeting policy*) difokuskan pada penyehatan fiskal yang berkesinambungan, dalam arti bahwa penentuan alokasi belanja disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang telah diperhitungkan secara matang. Karena bagaimanapun sumber

alokasi belanja ditentukan oleh dua hal, yakni pertama, bagaimana kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah dan kedua, memanfaatkan sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun 2008 yang baru saja telah ditetapkan.

Untuk menopang kebutuhan belanja dalam perubahan APBD tahun anggaran 2009 ini, ditinjau dari sumber pendapatan yang telah dihimpun, secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar *112 milyar 379 juta 758 ribu 80 rupiah atau naik 13,12 persen*. Kemudian sumber dari pembiayaan daerah dengan memanfaatkan selisih dari penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2008 yang mencapai *46 milyar 779 juta 487 ribu 247 rupiah 25 sen*, ternyata dari hasil audit perhitungan APBD tahun 2008 yang baru saja ditetapkan ada penurunan sebesar *2 milyar 583 juta 198 ribu 52 rupiah 75 sen* atau turun *5,23 persen* dari target sebelum perubahan sebesar 49 milyar 362 juta 685 ribu 300 rupiah. Dengan memanfaatkan sumber Pendapatan Daerah dari selisih SILPA Perhitungan tahun 2008 yang ternyata lebih kecil daripada besaran SILPA yang ditargetkan pada APBD tahun 2009, hal ini tentu akan

yang bersumber dari dana cukai dengan sasaran kegiatan kewirausahaan, ketrampilan kerja kelompok masyarakat di wilayah tembakau.

6. Dinas Perdagangan dan Koperasi, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar *933 juta 831 ribu 400 rupiah*. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk tambah daya listrik kantor baru dan showroom, perlengkapan gedung dan kegiatan bersumber dari dana cukai yang digunakan untuk kegiatan pelatihan teknis ditujukan kepada kelompok masyarakat petani tembakau dan para pekerja dibidang rokok serta melakukan upaya optimalisasi untuk meningkatkan peran usaha tembakau di Kabupaten Lamongan.

7. Satuan Polisi Pamong Praja, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar *325 juta 997 ribu 300 rupiah*. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk operasi yang berkenaan dengan cukai ilegal.

8. Sekretariat Daerah, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar *13 milyar 491 juta 121 ribu 650 rupiah*. Kenaikan belanja Sekretariat Daerah diantaranya dipergunakan untuk Pembelian Rumah Perwakilan di Jakarta, Pembebasan tanah

untuk Rowo Jabung *Ring Dyke* dan kegiatan yang bersumber dari dana cukai.

9. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset,

secara keseluruhan alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar *10 milyar 464 juta 293 ribu 878 rupiah 25 sen.*

Kenaikan terdapat pada belanja tidak langsung, belanja hibah Pembangunan jalan poros desa, belanja pemenuhan kewajiban dana-dana sharing, belanja bantuan keuangan tambahan TPAPD dan belanja bagi hasil pemungutan PBB kepada desa.

10. Badan Kepegawaian, alokasi belanjanya mengalami

kenaikan sebesar *312 juta 453 ribu 500 rupiah.* Kenaikan belanja diantaranya dipergunakan untuk Peningkatan Kinerja Pegawai.

11. Badan Pemberdayaan Masyarakat, alokasi belanjanya

mengalami kenaikan sebesar *575 juta 793 ribu 600 rupiah.* Kenaikan dipergunakan untuk operasional Gerdutaskin, PNPM Mandiri, P2SEM, Pelatihan dan memberi ketrampilan bagi keluarga miskin di wilayah petani tembakau dari dana cukai.

12. Dinas Pertanian dan Kehutanan, alokasi belanjanya

mengalami kenaikan sebesar *748 juta 48 ribu 800 rupiah.*

Kenaikan dipergunakan untuk kegiatan pendampingan dana bantuan kegiatan PLA (Pengelolaan Lahan dan Air) dan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana cukai antara lain dalam rangka pemberdayaan petani tembakau.

- 13. Kantor Pengelolaan Pasar,** alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar *2 milyar 476 juta 350 ribu 800 rupiah*. Kenaikan antara lain dipergunakan untuk biaya pemasaran dan promosi Plaza Lamongan dan Pasar Modern.

D. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah merupakan alokasi kebijakan keuangan sebagai implikasi dari rencana penerimaan Pendapatan dan rencana kebutuhan Belanja Daerah. Dengan fiskal daerah yang defisit, maka kebijakan pembiayaan menentukan terhadap bagaimana pemerintah daerah menutup defisit tersebut dalam suatu kebijakan pembiayaan. Dalam Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 mengalami defisit sebesar *53 milyar 835 juta 505 ribu 647 rupiah 25 sen*. Sebagai penyeimbang dari defisit yang terjadi, maka Kebijakan Pembiayaan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan secara keseluruhan setelah perubahan dialokasikan sebesar *81 milyar 977 juta 088 ribu 847 rupiah 25 sen* atau naik sebesar 10,45 persen. Kenaikan tersebut berasal dari :

1. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Lalu yang ditetapkan sebesar *49 milyar 362 juta 685 ribu 300 rupiah* mengalami penurunan sebesar 2 milyar 583 juta 198 ribu 52,75 sen. Penurunan disesuaikan dengan penetapan SILPA Tahun 2008.

2. Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah dalam perubahan ini direncanakan sebesar *139 juta 800 ribu rupiah*.

3. Pencairan Dana Cadangan dalam perubahan ini dilakukan penarikan dana cadangan dari dana yang telah dicadangkan sebesar *10 milyar 363 juta rupiah* selama tahun anggaran 2007 dan 2008. Pencairan dana cadangan ini dilakukan dengan mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang pembentukan dana cadangan.

4. Penerimaan Piutang Daerah dialokasikan sebesar *24 milyar 694 juta 801 ribu 600 rupiah* sehingga mengalami penurunan sebesar 0,65 persen. Penurunan disesuaikan dengan skedul pengembalian pinjaman dana-dana revolving.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam perubahan ini dialokasikan sebesar *28 milyar 141 juta 583 ribu 200 rupiah* sehingga tidak mengalami perubahan.

Dari kondisi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan, Pembiayaan Netto didapat sebesar *53 milyar 835 juta 505 ribu 647 rupiah 25 sen*, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan menjadi nol sebagaimana ditentukan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang pedoman Penyusunan APBD 2009, untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan harus habis dialokasikan.

mempersempit pergerakan belanja daerah dengan menyesuaikan kapasitas fiskal yang dimiliki.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Kurangnya stimulasi fiskal dari Pemerintah Pusat, berimplikasi pada kebijakan belanja daerah, disisi lain Pemerintah Kabupaten Lamongan dihadapkan pada sejumlah agenda pembangunan yang tentunya memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Untuk itu anggaran belanja pada perubahan APBD ini lebih memfokuskan pada penyesuaian belanja yang merupakan kebijakan Pemerintah dan belanja daerah untuk kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis melalui upaya konsolidasi dan rasionalisasi fiskal secara menyeluruh.

Dengan melihat kondisi serta perkembangan tersebut, maka Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2009, diarahkan sebagai berikut :

1. Untuk mencukupi kekurangan anggaran belanja pegawai dari kenaikan gaji rata-rata 15 % dan tambahan formasi pegawai baru.
2. Pembangunan Rumah Sakit Ngimbang dari dana dekonsentrasi percepatan pembangunan (dana stimulus)

3. Pembelian rumah dan tanah untuk Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Lamongan di Jakarta.
4. Memberikan tambahan kenaikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)
5. Hibah pembangunan jalan poros desa
6. Pembebasan Tanah Rawa - Jabung
7. Mencukupi kewajiban Dana sharing kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi
8. Tambahan Dana Penyesuaian Tunjangan Fungsional Kependidikan
9. Kegiatan yang diarahkan dari dana alokasi cukai
10. Kegiatan lainnya yang sudah diarahkan oleh pemerintah baik pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat.

Dari berbagai penelaahan kondisi dan arah serta kebijakan anggaran belanja, maka volume Belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dialokasikan sebesar *1 trilyun 22 milyar 541 juta 377 ribu 709 rupiah 25 sen* atau mengalami kenaikan sebesar 13,35 persen.

Ditinjau dari Belanja menurut fungsi, maka dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan dialokasikan mengalami kenaikan sebesar *58 milyar 424 juta 742 ribu 378, 25 sen*. Dari masing-masing komponen Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar *44 milyar 481 juta 942 ribu 300 rupiah*. Kenaikan belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk menampung adanya kenaikan gaji pegawai dan tambahan formasi pegawai baru dimana dalam penyerapan belanja berjalan dalam perhitungan satu tahun dari alokasi target sebelum perubahan belum mencukupi.

Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar *8 milyar 388 juta 920 ribu rupiah*. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk alokasi belanja poros desa yang direncanakan untuk 123 desa, belum termasuk program PNPM Mandiri yang sumber dananya dari Pemerintah Pusat langsung kepada masyarakat desa yang direncanakan untuk 273 desa, selain itu juga menampung dana Jamkesmas untuk masyarakat miskin.

Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar *2 milyar 590 juta rupiah*. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk kekurangan sharing PNPM Mandiri Perkotaan, kekurangan sharing PNPM Pengembangan Kecamatan dan menampung tambahan bantuan Partai Politik yang disesuaikan dengan jumlah kursi anggota DPRD.

Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa mengalami kenaikan sebesar *504 juta 826 ribu rupiah*. Kenaikan tersebut digunakan untuk bagi hasil PBB kepada desa menyesuaikan target penerimaan PBB.

Belanja Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa mengalami kenaikan sebesar *2 milyar 531 juta 250 ribu rupiah*. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk memberikan tambahan kenaikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD).

Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD mengalami penurunan sebesar *72 juta 159 ribu 921 rupiah 75 sen*. Dana tersebut menampung dana cadangan dalam menghadapi bencana alam dan sosial, selain itu juga berfungsi untuk menyeimbangkan pembiayaan netto

sehingga seluruh kapasitas fiskal sudah dialokasikan di dalam Perubahan APBD.

b. Belanja Langsung menampung kegiatan-kegiatan setiap SKPD, pada perubahan APBD ini mengalami kenaikan sebesar *62 milyar 66 juta 658 ribu 800 rupiah*. Kenaikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar *241 juta 45 ribu 100 rupiah*. Penurunan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung merupakan langkah efisiensi dalam belanja personil untuk menampung belanja Honorarium Panitia pelaksanaan kegiatan.

Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar *6 milyar 879 juta 347 ribu 700 rupiah*. Kenaikan belanja barang dan jasa sebagian besar difungsikan sebagai biaya operasional dalam suatu kegiatan yang penggunaannya bersifat habis pakai.

Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar *55 milyar 428 juta 356 ribu 200 rupiah*. Kenaikan Belanja Modal dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat menambah aset,

berupa pengadaan barang/peralatan, bangunan, dan konstruksi.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya belanja daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagian besar kenaikan dan penurunannya disebabkan penyesuaian belanja gaji yang tidak mencukupi kebutuhan dalam satu tahun. ✓

Sedangkan belanja daerah pada kegiatan SKPD yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah diantaranya :

- 1. Dinas Kesehatan,** alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar *42 milyar 666 juta 575 ribu 100 rupiah.* Kenaikan ini sebagian besar untuk kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Ngimbang yang bersumber dari dana Hibah Pemerintah Pusat, Kegiatan untuk penyediaan biaya operasional dan jasa administrasi Askes, peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan untuk belanja makan dan minum pasien di puskesmas serta kegiatan yang bersumber dari dana cukai.

2. **RSD Dr. Soegiri**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar *2 milyar 761 juta 794 ribu 800 rupiah*. Kenaikan ini dipergunakan untuk belanja operasional ASKES, Akreditasi Rumah Sakit untuk mempertahankan penilaian status Rumah Sakit Tipe B, pengembangan instalasi listrik untuk operasional alat Hemodialisasi dan pengadaan alat kesehatan bagi penderita dampak rokok berasal dari dana cukai.
3. **Badan Lingkungan Hidup**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar *523 juta 576 ribu 500 rupiah*. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk kegiatan yang diarahkan bersumber dari dana cukai, dan kegiatan yang mendukung adipura.
4. **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar *736 juta 830 ribu 300 rupiah*. Kenaikan diantaranya dipergunakan untuk penyediaan blangko Catatan Sipil dan Akte Kependudukan serta updating database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
5. **Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**, alokasi belanjanya mengalami kenaikan sebesar *397 juta 731 ribu 150 rupiah*. Yang dipergunakan untuk menampung kegiatan

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikian pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 yang saya sampaikan, dengan harapan bahwa pokok-pokok kebijakan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan dapat tergambarkan.

Sebagai akhir kata, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kesabaran Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang Terhormat, serta hadirin semuanya.

Wallahu Mu'afiq Ilaqumi Thoriq Tsuma Bilahittaufik Wal Hidayah,

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Lamongan, 29 Juni 2009

BUPATI LAMONGAN


MASFUK